

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia terletak di tiga pertemuan lempeng bumi yaitu Lempeng Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia yang menjadikan Negara Indonesia sebagai daerah yang rawan terhadap bencana geologis (Maarif, 2012a, p. 3). Selain itu, Indonesia berada pada deretan gunungapi pasifik (*Pacific Ring of Fire*), dimana terdapat 129 gunungapi yang sewaktu-waktu dapat mengalami erupsi. Gunung Merapi yang terletak di Provinsi D.I. Yogyakarta terus memperlihatkan aktivitas vulkaniknya yang semakin mempertegas predikat Negara Indonesia sebagai negara sabuk api. Kekayaan alam Indonesia dengan beragam gunungapi tersebut dapat menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik (BNPB, 2019).

Gunung Merapi terletak di antara perbatasan Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gunung Merapi memiliki ketinggian sekitar 2.978 mdpl, berdiameter 28 km, luas 300-400 km, dan bertipe gunungapi strato dengan kubah lava (Qowo, 2014, p. 11). Letusan Gunung Merapi tahun 2010 merupakan letusan yang tergolong besar dengan tingkat *Volcanic Explosivity Index* (VEI) sebesar 4 (Surono *et al*, 2012, 62). Tercatat berturut-turut tahun 1994, 1997, 1998, 2001, 2006, dan 2010, 2012 Gunung Merapi mengalami erupsi, bahkan tahun 2018 hingga 2020 lalu Gunung Merapi kembali menampakkan aktivitas vulkaniknya dengan mengalami erupsi walaupun dengan tingkat destruktif yang lebih rendah (Widodo dan Hastuti, 2019, p. 22). Pada bulan Mei 2018, Gunung Merapi berstatus Waspada (level II), saat itu terjadi erupsi magmatis yang berlangsung hingga September 2019. Selain itu, terjadi peningkatan gempa vulkanik dalam (VA), vulkanik dangkal (VB) dan rangkaian letusan eksplosif (MP) sampai Juni 2020. Berdasarkan data pemantauan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Gunung Api

(BPPTKG), bulan Juli 2020 terjadi gempa VA 6 kali, VB 33 kali dan MP 339 kali. Bulan Oktober 2020 aktivitas kegempaan meningkat semakin intensif. Pada November 2020 rata-rata gempa VB terjadi 29 kali per hari, MP 272 kali per hari, guguran (RF) 57 kali per hari dan hembusan (DG) 64 kali per hari. Oleh karena itu, pada November 2020 status Gunung Merapi ditingkatkan menjadi Siaga (level III) oleh BPPTKG (BPPTKG, 2020). Data aktivitas vulkanik tersebut menjadikan Gunung Merapi sebagai gunungapi paling aktif di dunia (Wahyuni dan Sakir, 2021, p. 133).

Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 merupakan erupsi terbesar gunung tersebut dalam 1 abad terakhir, sehingga erupsi tahun 2010 menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi (Widodo dan Hastuti, 2019, p. 23). Letusan Gunung Merapi tahun 2010 tersebut memiliki VEI 4 setara dengan erupsi Gunung Merapi tahun 1872 yang memiliki dampak kerusakan besar (Voight *et al*, 2000). VEI adalah indeks yang digunakan untuk mengukur magnitude erupsi, semakin tinggi angka VEI maka semakin besar erupsi yang terjadi (Pyle, 2000). Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 lalu, memberikan dampak kepada 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman di Provinsi D.I Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah. Total terdapat 34 Desa dari 4 Kabupaten yang terdampak oleh erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Berdasarkan data kaji cepat kebencanaan, di Kabupaten Sleman terdapat 354 jiwa meninggal dunia, 240 jiwa luka-luka, 47.486 orang mengungsi akibat erupsi Gunung Merapi 2010 (Febriyan, 2017). Selain itu, erupsi juga menimbulkan 2.636 rumah rusak berat, 156 rumah rusak sedang, dan 632 rumah rusak ringan. Total keseluruhan rumah yang mengalami kerusakan di Kabupaten Sleman tercatat 3.424 rumah dengan total kerugian sebesar Rp. 3.557 triliun (Susilo dan Rudiarto, 2014, p. 45).

Berdasarkan hasil penelitian Fatmawati dan Rahayu (2016, p. 362), diperoleh hasil bahwa kerusakan terparah yang ada di Kabupaten Sleman terdapat di Kecamatan Cangkringan. Terdapat 3 Desa yang terdampak

sangat parah, yaitu Desa Umbulharjo, Desa Glagaharjo dan Desa Kepuharjo. Dari ketiga desa tersebut, Desa Glagaharjo merupakan desa yang berada paling dekat dengan puncak Gunung Merapi yang hanya berjarak 3,98 km. Desa Glagaharjo menjadi desa yang mengalami kerusakan paling parah, hampir seratus persen wilayahnya terkena dampak erupsi gunung Merapi tahun 2010. Sehingga dari 34 desa yang terdampak erupsi Gunung Merapi tahun 2010, Desa Glagaharjo menjadi desa yang paling terdampak (Citra, 2014, p. 62).

Desa Glagaharjo terdiri atas 10 dusun, dimana dari 10 dusun tersebut terdapat tiga dusun yang ditetapkan sebagai daerah Kawasan Rawan Bencana III (KRB III) oleh BNPB pasca erupsi Gunung Merapi 2010, dan 7 dusun lain masuk ke dalam Kawasan Rawan Bencana II (KRB II) (Citra, 2014, p. 69). KRB III adalah kawasan yang paling dekat dengan sumber ancaman erupsi merapi, yang berpotensi tinggi terdampak awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu pijar, dan hujan abu dari Gunung Merapi. Akibat tingkat kerawanannya yang tinggi daerah ini tidak diziinkan sebagai daerah hunian tetap, namun hanya dapat digunakan sebagai hutan lindung untuk tujuan konservasi, pemanfaatan sumber daya air, kehutanan, pertanian, penelitian dan wisata alam (Kementerian ESDM, 2011).

Risiko bencana erupsi Gunung Merapi semakin meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Pemukiman penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Sleman semakin padat dari tahun ke tahun, dibuktikan dalam tabel jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Sleman sebagai berikut.

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman, 2010, 2016, dan 2017					
Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)			Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk pertahun (%)	
	2010	2016	2017	2010-2017	2016-2017
Moyudan	31.151	31.458	31.497	0,16	0,16
Minggir	29.517	29.844	29.886	0,18	0,18
Seyegan	45.454	46.902	47.129	0,52	0,52
Godean	66.520	71.239	72.028	1,14	1,14
Gamping	97.777	107.084	108.675	1,52	1,52
Mlati	102.038	112.021	113.732	1,56	1,56
Depok	183.149	188.771	189.649	0,5	0,5
Berbah	51.305	57.691	58.806	1,97	1,97
Prambanan	47.272	48.395	48.565	0,39	0,39
Kalasan	76.920	85.220	86.654	1,72	1,72
Ngemplak	59.529	65.016	65.951	1,47	1,47
Ngaglik	102.955	117.751	120.368	2,26	2,26
Sleman	63.350	67.201	67.839	0,98	0,98
Tempel	49.746	50.599	50.723	0,28	0,28
Turi	33.396	34.233	34.361	0,41	0,41
Pakem	35.001	37.733	38.193	1,25	1,25
Cangkringan	28.454	29.321	29.456	0,5	0,5
Sleman	1.103.534	1.180.479	1.193.512	1,13	8,15

Tabel 1.1 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sleman
Sumber: BPS Kabupaten Sleman

Selain tingginya laju pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur dan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman semakin meningkatkan kerentanan penduduk terhadap ancaman letusan Gunung Merapi (Tilling, 2013, p. 114). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB setiap tahun. Nilai PDRB yang tinggi menunjukkan tingginya aktivitas produksi barang dan jasa di daerah tersebut (Yuniati dan Suryati, 2018, p. 1168). Hal tersebut dapat mengancam ketahanan wilayah dari Kabupaten Sleman terhadap bencana.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB Kabupaten Sleman
Sumber: BPS Kabupaten Sleman

Ketahanan wilayah adalah kondisi dinamik suatu wilayah yang meliputi segenap aspek kehidupan yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan dalam menghadapi ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar untuk menjamin identitas, integritas dan tujuan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, ketahanan wilayah dapat digunakan sebagai tolok ukur pembangunan suatu wilayah (Pradika, Giyarsih dan Hartono, 2018, p. 264). Ketahanan wilayah merupakan rangkaian dari delapan aspek ketahanan nasional dalam lingkup wilayah yang dikenal dengan *Astagatra*. *Astagatra* terdiri dari *Trigatra* yang meliputi aspek geografi, demografi dan kekayaan alam serta *Pancagatra* yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (Lemhannas, 1997). Ketahanan wilayah merupakan bentuk mikro dari ketahanan nasional, dimana setiap aspek pada ketahanan wilayah tersebut akan memiliki dampak terhadap ketahanan nasional sebagai bentuk ketahanan yang sebenarnya,

sehingga stabilitas ketahanan wilayah sangat diperlukan (Alfaqi, Habidi dan Rapita, 2017, p. 321).

Dalam konteks kebencanaan, bencana dapat mengganggu stabilitas, menimbulkan ketidakpastian, kekacauan dan runtuhnya sistem sosial masyarakat. Bencana juga dapat menghancurkan perekonomian dan mengganggu keamanan warga, sehingga bencana menjadi salah satu hal yang dapat mengancam ketahanan wilayah. Melalui dasar tersebut, ketahanan wilayah terhadap bencana harus diciptakan (Pradika, Giyarsih dan Hartono, 2018, p. 264). Terdapat dua cara untuk memahami ketahanan wilayah terhadap bencana di masyarakat. *Pertama*, ketahanan yang dalam konteks bencana, artinya mereka menyiapkan segala rancangan sistem prosedur yang membuat mereka dapat bertahan atau meminimalisasi risiko akibat bencana. *Kedua*, ketahanan yang dimaksudkan untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Ada beberapa aktivitas yang dikerjakan untuk merancang konsep pengurangan risiko bencana secara lebih visioner dalam rangka menyiapkan kehidupan generasi ke depan yang lebih baik (Sirimorok, 2010). Terdapat 71 indikator yang terbagi menjadi 7 prioritas yang telah disepakati dalam mewujudkan ketahanan wilayah yang berkorelasi dengan penurunan indeks risiko bencana (BNPB, 2015: 2). 71 indikator tersebut tersusun dalam suatu instrumen pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Oleh karena itu, untuk mengetahui pengaruh program Desa Tangguh Bencana (Destana) terhadap ketahanan wilayah, digunakan instrumen Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai indikatornya.

Ancaman erupsi Gunung Merapi menjadi salah satu ancaman nyata terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman. Rata-rata Gunung Merapi meletus dalam siklus pendek yang terjadi setiap 2 – 5 tahun dan siklus menengah setiap 5 – 7 tahun (Rahayu *et al*, 2014, p. 61). Berdasarkan data tersebut, maka Gunung Merapi adalah gunung yang

sewaktu-waktu dapat kembali meletus dan mengancam kehidupan masyarakat. WMO (2006) menjelaskan bahwa Gunung Merapi telah menjadi *permanent hazard* yang secara konsisten dapat terus memberikan ancaman terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman. Selain letusan Gunung Merapi, ancaman bencana non alam pandemi Covid-19 turut menjadi tantangan bagi ketahanan wilayah Kabupaten Sleman. Pandemi Covid-19 ini dapat memperparah dampak yang diberikan oleh letusan Gunung Merapi.

Terdapat 3 komponen penting dalam manajemen risiko, yaitu menentukan risiko dari ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan keterpaparan (*exposure*). Ketika ancaman bertemu dengan kerentanan maka akan menimbulkan bencana, sehingga perlu dilakukan manajemen pada ketiga komponen tersebut. Salah satu wujud tindakan manajemen dalam menghadapi risiko tersebut yaitu Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dengan meningkatkan kapasitas dan menurunkan kerentanan (Paripurno dan Jannah, 2011, p. 20). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) untuk meminimalkan dampak dari ancaman letusan Gunung Merapi dan Pandemi Covid-19.

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) atau *Disaster Risk Reduction* (DRR) adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko bencana (Twigg dan Lavell, 2006). Susanti (2018) menjelaskan bahwa PRB adalah suatu upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. PRB adalah kerangka konseptual atau elemen yang dipertimbangkan dalam meminimalkan kerentanan dan risiko bencana di seluruh masyarakat. PRB dapat dilakukan dengan cara menghindari (pencegahan), membatasi (mitigasi dan kesiapsiagaan), dan mengurangi dampak yang merugikan (Zahra, 2018). Tujuan utama dari PRB adalah untuk meningkatkan kapasitas *stakeholders* serta memberdayakan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana (Djalante dan Garschagen, 2017).

Bencana dapat terjadi apabila komunitas masyarakat tersebut memiliki tingkat kapasitas yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat ancaman yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, bencana dapat menyebabkan 1) perubahan pola kehidupan komunitas masyarakat, 2) kerugian harta benda dan jiwa manusia, 3) kerusakan struktur sosial komunitas masyarakat, dan 4) munculnya lonjakan kebutuhan pribadi dan komunitas. Oleh karena itu, bencana cenderung terjadi pada komunitas yang rentan dan membuat komunitas tersebut semakin rentan. Jika tingkat kerentanan masyarakat tinggi, justru dapat menjadi salah satu sumber ancaman bencana. Kerentanan komunitas diawali oleh kondisi lingkungan fisik, sosial dan ekonomi yang tidak aman yang melekat padanya (Tilling, 2013, p. 144). Sehingga pengelolaan risiko bencana perlu dilakukan hingga pada tingkat *grassroot* atau komunitas lokal di masyarakat.

Salah satu pengembangan dari PRB adalah PRB berbasis komunitas (PRBBK). Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) atau *Community-based Disaster Risk Reduction* (CBDRR) merupakan upaya pemberdayaan komunitas agar dapat mengelola ancaman bencana dengan tingkat keterlibatan pihak/kelompok masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan sumber daya lokal dalam kegiatan pengelolaan bencana (Maarif, 2015, p. 11). Abarquez dan Murshed (2004) menjelaskan bahwa PRBBK adalah sebuah kegiatan dimana masyarakat secara aktif terlibat dalam identifikasi, analisis, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan mereka dan meningkatkan kapasitas mereka.

Pendekatan PRBBK ini menempatkan masyarakat dalam jantung pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan manajemen risiko bencana. Pendekatan ini memandang bahwa bencana sebagai masalah kerentanan masyarakat dan merekomendasikan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi akar penyebab kerentanan dengan mendorong transformasi atau perubahan pada struktur sosial, ekonomi,

dan politik yang menimbulkan ketidakadilan dan keterbelakangan (Shaw, 2012, p. 5). Sehingga dapat dikatakan bahwa karakteristik dasar PRBBK dicirikan dengan menempatkan kekuasaan tertinggi pengelolaan risiko dan kesiapsiagaan menghadapi bencana berada di tangan kelembagaan yang berbasis komunitas/masyarakat.

Maarif (2015) menjelaskan bahwa sekitar 80% penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masyarakat setempat yang terkena bencana. Masyarakat setempat merupakan penanggap pertama (*the first responder*) dalam menghadapi bencana, sedangkan bantuan pemerintah atau lembaga eksternal lainnya selalu datang belakangan (p. 8). Hal ini menunjukkan bahwa risiko bencana dapat diperkecil dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Lebih jauh jika dianalisis bahwa suatu kondisi disebut bencana apabila masyarakat yang terpapar ancaman tidak mempunyai kapasitas untuk menanggulangnya, dimana kerentanan yang muncul sebagian besar ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri (Maarif, 2015, p. 8). Kasus tersebut dapat dilihat pada fenomena masyarakat lereng Gunung Merapi.

Masyarakat lereng Gunung Merapi memiliki kearifan lokal berupa pemahaman dalam bentuk istilah bahasa Jawa "*Merapi lagi duwe gawe*" (merapi sedang mempunyai hajatan). Istilah ini sering digaungkan oleh juru kunci Gunung Merapi, Almarhum Mbah Maridjan yang bertujuan untuk mengganti istilah Gunung Merapi akan meletus dengan kata lain yang lebih halus. Bagi masyarakat, Gunung Merapi tidak hanya dipahami sebagai gunung, melainkan subjek alam yang memberi banyak manfaat dan nilai bagi kehidupan masyarakat (Aditya, 2020). Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa masyarakat lereng Gunung Merapi telah mampu melihat potensi ancaman Gunung Merapi, bahkan lebih jauh masyarakat tersebut telah mampu melihat hikmah dibalik ancaman Gunung Merapi. Masyarakat lereng Gunung Merapi telah mampu hidup harmonis dengan ancaman Gunung Merapi, walaupun belum sepenuhnya dapat mandiri menghadapi ancaman Gunung Merapi (Maarif *et al*, 2012, p. 2). Namun

pasca erupsi Gunung Merapi 2010, nilai-nilai kearifan lokal tersebut perlahan mulai luntur.

Pasca erupsi Gunung Merapi 2010, banyak masyarakat yang beralih pekerjaan menjadi penambang pasir. Penambangan pasir di Kabupaten Sleman erat kaitannya dengan aktivitas Gunung Merapi atas melimpahnya pasir hasil erupsi. Sebagian besar kegiatan penambangan pasir tersebut ilegal tanpa izin yang berpotensi menimbulkan ancaman tanah longsor dan kerusakan lingkungan (Bayu, 2021). Hastuti (2016) menjelaskan pada dasarnya masyarakat paham bahwa kegiatan penambangan pasir berdampak buruk kepada kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang mengancam keberadaan sumber air mereka. Namun dilema muncul akibat sebagian besar warga masih menggantungkan hidupnya dari kegiatan penambangan pasir dan sulit mencari pekerjaan lainnya (p. 80).

Bulan September 2021, Pemerintah Provinsi DIY melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menutup sebanyak 14 penambangan pasir ilegal karena dapat membahayakan warga sekitar dan kelestarian lingkungan. Pelarangan izin penambangan di lokasi yang dilarang untuk ditambang untuk ditambang sudah sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, wilayah pertambangan ilegal tersebut merupakan wilayah tangkapan air yang dilarang untuk ditambang (Hasanudin, 2021). Berdasarkan fakta tersebut terlihat bahwa nilai-nilai kearifan lokal masyarakat lereng Gunung Merapi mulai memudar akibat perilaku mereka sendiri, dan secara tidak langsung turut meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap ancaman Gunung Merapi.

Berdasarkan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*, fokus pengelolaan bencana berprioritas pada peningkatan *community awareness and preparedness* (kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat) (Adiyoso dan Kusumaningtyas, 2018, p. 98). Sehingga pengelolaan bencana diharapkan tidak terbatas pada pendekatan fisik sesaat saja namun juga dapat mengembangkan *socio-economic*

masyarakat lokal yang terdampak secara berkelanjutan (Maskrey, 1998). Pengembangan desa/kelurahan Tangguh Bencana (Destana) merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat yang dikembangkan di Indonesia (Widana, 2019, p. 137).

Desa Tangguh Bencana (Destana) adalah konsep desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Perka BNPB No 1 Tahun 2012). Program ini menjadi salah satu program yang turut mendukung prioritas *Sendai Framework*, dimana program ini dapat meningkatkan *community awareness and preparedness* dengan membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Ketangguhan tersebut bersifat multidisiplin dan multisektoral, terutama yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketangguhan yang dimaksud adalah ketangguhan ikhtiyar yang tidak bisa dinilai oleh pihak manapun, kecuali oleh yang bersangkutan. Ikhtiyar yang dimaksud adalah bahwa tidak ada jaminan bahwa desa tangguh bencana ketika mengalami bencana tidak akan mengalami korban jiwa atau kerugian, namun setidaknya desa tersebut sudah berusaha seoptimal mungkin dalam mengurangi risiko bencana yang muncul (Suryotomo *et al*, 2019, p. 2).

Desa adalah pemerintah di tingkat paling bawah, dan masyarakatnya adalah pelaku utama dalam upaya penanggulangan bencana sekaligus menjadi kelompok pertama yang menerima dampak bencana. Untuk menanggulangi desa tidak bisa dilakukan dalam kurun waktu singkat, butuh proses dalam membangun ketangguhan yang berkelanjutan dan menjadikan budaya sadar bencana menjadi nilai-nilai dalam pembangunan di desa. Oleh karena itu BNPB, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyusun program Desa Tangguh Bencana (Destana) (Suryotomo *et al*, 2019, p. 3). Destana ini pun menjadi salah satu upaya

strategi untuk mewujudkan visi BNPB yaitu “Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana”.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 pasal 10 ayat (4) berbunyi bahwa penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan kegiatan yang bersifat fisik, nonfisik dan pemberdayaan pelaku kegiatan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana yang dilakukan dengan pembangunan fisik, nonfisik dan pengembangan masyarakat akan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan memperkuat ketahanan dalam menghadapi bencana, sehingga pengarusutamaan PRB melalui pembangunan struktural dan nonstruktural sangat diperlukan dalam menjamin kelangsungan hidup masyarakat (Isdarwati, 2019). Jurnal penelitian menunjukkan bahwa sangat diperlukan pelaksanaan mitigasi bencana melalui pendidikan, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat serta perencanaan penanggulangan bencana di daerah rawan bencana Kecamatan Cangkringan (Iswardi, 2018). Untuk melihat keberhasilan dalam PRB di Kecamatan Cangkringan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pengurangan risiko bencana (PRB) di daerah rawan bencana Kecamatan Cangkringan.

Secara teori pengurangan risiko bencana berbasis desa tangguh bencana dapat mendukung terwujudnya ketahanan wilayah, karena pengurangan risiko bencana berbasis desa tangguh bencana dapat meningkatkan kapasitas dan menurunkan kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Di sisi lain, hingga saat ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa ada keterkaitan antara pengurangan risiko bencana berbasis komunitas desa tangguh bencana di Desa Glagaharjo terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang menganalisis pengurangan risiko bencana berbasis komunitas desa tangguh bencana di Desa Glagaharjo dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah di Kabupaten Sleman.

1.2 Fokus dan Subfokus

Fokus pada penelitian ini adalah tentang pengurangan risiko bencana berbasis desa tangguh bencana. Sub fokus yang diambil pada penelitian ini adalah:

- a. Pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis desa tangguh bencana di Desa Glagaharjo.
- b. Implikasi pengurangan risiko bencana berbasis desa tangguh bencana di Desa Glagaharjo terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis desa tangguh bencana di Desa Glagaharjo?
- b. Bagaimana implikasi pengurangan risiko bencana berbasis desa tangguh bencana di Desa Glagaharjo terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis desa tangguh bencana di Desa Glagaharjo.
- b. Menganalisis implikasi pengurangan risiko bencana berbasis desa tangguh bencana di Desa Glagaharjo terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sleman.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu pertahanan negara dalam menghadapi bencana alam dan upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi ketahanan wilayah untuk mendukung keamanan nasional negara.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Sleman dan instansi/lembaga terkait;
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan dalam upaya pengurangan risiko bencana berbasis desa tangguh bencana dan peningkatan ketahanan wilayah Kabupaten Sleman.
- b. Akademisi dan praktisi kebencanaan;
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian lanjut mengenai upaya pengurangan risiko bencana berbasis desa tangguh bencana dan kaitannya terhadap ketahanan wilayah suatu daerah.
- c. Media dan dunia usaha;
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi para pelaku usaha dalam menentukan strategi dalam membangun usaha di kawasan rawan bencana dan sebagai salah satu informasi bagi media massa dalam menyusun berita.
- d. Masyarakat Kabupaten Sleman, terutama masyarakat Desa Glagaharjo.
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi berupa saran dan rekomendasi terkait upaya pengurangan risiko bencana berbasis desa tangguh bencana bagi masyarakat di

Kabupaten Sleman terutama masyarakat Desa Glagaharjo yang berada di kawasan rawan bencana.